



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SUB UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DODIK RIDHO NURROCHMAT**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI**
3. NHK : **83888**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.895.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/115 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m²/115 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m²/150 m² di PONOROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/45 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/45 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m²/45 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 248.000.000**

1. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 117.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 109.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

4.500.000

6. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **210.475.000****D. SURAT BERTHARGA** Rp. **985.000.000****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **2.992.350.700****F. HARTA LAINNYA** Rp. **300.000.000****Sub Total** Rp. **7.630.825.700****III. HUTANG** Rp. **115.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **7.515.825.700**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **12 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.